

IMPLEMENTASI KURIKULUM PEMBELAJARAN FIKIH DI MIN 1 HUMBANG HASUNDUTAN

Riniwati Ritonga

MIN 1 Humbang Hasundutan

Email: riniwatiritonga@gmail.com

**Jurnal Ilmu
Tarbiyah dan
Keguruan
(JITK)**

Vol. 1 No. 1
2023

Abstrak: Setiap aktivitas pembelajaran dilaksanakan berbasis kurikulum. Untuk itu, kebijakan internal madrasah diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum sebagai upaya menyesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pelaksanaan kurikulum pembelajaran fikih di MIN 1 Humbang Hasundutan. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan atau literatur kepustakaan yang berkaitan dengan manajemen kurikulum pembelajaran fikih di MIN 1 Humbang Hasundutan. Dengan penelitian ini, diharapkan tergal data yang berupa kata atau makna untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya secara mendalam apa yang dilakukan oleh MIN 1 Humbang Hasundutan dalam melaksanakan manajemen kurikulum fikih. Adapun yang dijadikan sebagai informan atau narasumber adalah kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, dan guru mata pelajaran fikih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kurikulum fikih di MIN 1 Humbang Hasundutan terlaksana dengan baik. Hal ini ditandai dengan (1) aspek perencanaan; meliputi analisis kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, analisis ketersediaan dan kesiapan sumber daya di madrasah, analisis program pendukung yang dilaksanakan dalam agenda rapat kerja tahunan (2) aspek pelaksanaan; meliputi optimalisasi peran supervisor dan monitoring kepala madrasah, pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi dan kualitas para guru, serta koordinasi dengan para guru di madrasah dalam agenda rapat mingguan, (3) aspek evaluasi; meliputi penilaian setiap tahun sekali, berupa evaluasi program dalam kurikulum, perencanaan perangkat pembelajaran, dan evaluasi peserta didik.
Kata Kunci: *Kebijakan, Kurikulum, Pembelajaran Fikih.*

Abstract: *Each learning activity is carried out based on the curriculum. For this reason, madrasah internal policies are needed in implementing the curriculum as an effort to adapt to changes and community needs. This study aims to describe the implementation of the policy of implementing the fiqh learning curriculum at MIN 1 Humbang Hasundutan. This study seeks to describe or describe data obtained from the field or literature related to the management of the fiqh learning curriculum at MIN 1 Humbang Hasundutan. With this research, it is hoped that data in the form of words or meanings will be explored to explain the actual situation in depth what was done by MIN 1 Humbang Hasundutan in carrying out fiqh curriculum management. Those who were used as informants or resource persons were the head of the madrasa, the deputy head of the madrasa for curriculum, and the teacher of fiqh subjects. The results of this study indicate that*

overall the implementation of the fiqh curriculum at MIN 1 Humbang Hasundutan has been well implemented. This is characterized by (1) planning aspects; includes an analysis of the needs and conditions of the local community, an analysis of the availability and readiness of resources in madrasahs, an analysis of supporting programs implemented in the annual work meeting agenda (2) aspects of implementation; includes optimizing the role of supervisors and monitoring the madrasah head, implementing training to improve the competence and quality of teachers, as well as coordinating with teachers in madrasahs in the weekly meeting agenda, (3) evaluation aspect; includes an annual assessment, in the form of program evaluation in the curriculum, learning device planning, and student evaluation.

Keywords: Policy, Curriculum, Fikih Learning.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum, mengatur kebijakan pendidikan sebagai bidang prioritas dalam memajukan kehidupan bangsa (Aziz, *et.al.*, 2020). Ini juga menjadi alasan mengapa kurikulum pendidikan nasional senantiasa berubah-ubah, guna meng-*upgrade* sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Penetapan kebijakan pendidikan, diharapkan menjadi landasan konstitusional yang dapat dijadikan pedoman dalam proses penyelenggaraan pendidikan (Rozak, 2021). Kemudian, memberikan manfaat (dampak) nyata bagi masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi anak, watak (kepribadian), serta menuju peradaban yang cemerlang (Pratama, 2019).

Kebijakan pendidikan merupakan faktor utama sebagai landasan (pedoman) dan orientasi (arah) dalam penyelenggaraan pendidikan (Anwar, 2017). Setiap negara memiliki kebijakan pendidikan yang berlaku secara nasional, serta setiap satuan lembaga pendidikan menyelenggarakan proses pendidikan mengacu pada kebijakan nasional (Lengkana & Sofa, 2017). Sebagaimana yang termaktub dalam sistem pendidikan nasional (Supardi, 2015).

Problematika yang muncul dalam dunia pendidikan, yakni perbedaan (kesenjangan) antara konsep dan praktik (Amri, *et.al.*, 2021). Di mana, konsep yang disusun resmi secara konstitusional, akan tetapi realita di lapangan masih banyak masyarakat yang belum bisa mengenyam dunia pendidikan. Selanjutnya, upaya *upgrade* kurikulum menghadirkan problematika tersendiri bagi dunia pendidikan, di mana perubahan temporal kurikulum menjadikan para guru (pendidik) terbelenggu dengan perihal administratif ketimbang fokus mengajar siswa (Disas, 2017).

Kelemahan sistem pendidikan Indonesia yang “diberatkan” dengan perihal administratif, menyebabkan terhambatnya proses implemmentasi kurikulum pendidikan nasional (El Widad & Bakar, 2021). Padahal, kurikulum memiliki peranan penting dalam pendidikan, bahkan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Ini menjadi alasan mengapa kurikulum harus di-*upgrade* dan direvitalisasi konten dan konteks penerapannya (Saifuddin, 2015). Sehingga inovasi pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan komprehensif. Oleh karena itu, penetapan dan penerapan kurikulum disusun secara bertahap (sesuai jenjang pendidikan) dan kebutuhan lapangan kerja.

Dalam implementasi kurikulum yang baru, beberapa faktor seperti sumber daya sekolah, masyarakat, kepala sekolah, guru, dan faktor eksternal harus diperhatikan dan dipersiapkan secara maksimal (Hastuti & Soehartono, 2018). Disas (2018) menjelaskan kelima faktor tersebut, yaitu: lingkungan sekolah (terkait dengan kondisi sekolah, sarana, dan prasarana pendukung), masyarakat (terkait dukungan masyarakat), kepala sekolah (terkait dengan manajemen dan kepemimpinan), guru

(terkait respons atau dukungan partisipasi guru), dan faktor eksternal (terkait dukungan dari pemerintah/*stakeholder*/swasta).

Pemerintah pada tahun 2013 telah mengeluarkan kebijakan tentang kurikulum 2013, bahwa kebijakan ini antara lain memberi ruang gerak yang luas kepada lembaga pendidikan (Elwijaya, *et.al.*, 2021), khususnya Madrasah Ibtidaiyah yang menjadi fokus penelitian ini. Upaya tersebut dalam mengelola sumber daya yang ada, dengan cara mengalokasikan seluruh potensi dan prioritas sehingga mampu melakukan terobosan-terobosan sistem pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Salah satu upaya kreatif dalam melaksanakan pembelajaran yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi di Madrasah Ibtidaiyah adalah dengan cara melakukan pembelajaran tematik (Winata, *et.al.*, 2021).

Sebagai arah dan pedoman proses penyelenggaraan pendidikan, maka diseimbangkan proses pendidikan dan potensi peserta didik, serta diberi ruang kreasi dan inovasi bagi pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional berbasis kearifan lokal. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Humbang Hasundutan adalah lembaga pendidikan Islam yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 yang mulai diberlakukan pada awal semester I tahun pelajaran 2014/2015 dan diberlakukan kepada peserta didik kelas I sampai kelas IV, khususnya pada mata pelajaran fikih, sementara peserta didik kelas V dan peserta didik kelas VI masih menggunakan KTSP. Pada beberapa Kabupaten di seluruh Indonesia, penerapan Kurikulum 2013 diterapkan pada tahun pelajaran 2013/2014 pada sekolah-sekolah tertentu (terbatas), di Kabupaten Humbang Hasundutan kebijakan yang diberlakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Humbang Hasundutan menerapkan Kurikulum 2013 serentak dilaksanakan pada awal tahun pelajaran 2014/2015, sebagai konsekuensinya seluruh sekolah dari berbagai tingkatan di bawah Kementerian Agama Kabupaten Humbang Hasundutan harus menerapkan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015, di antaranya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Humbang Hasundutan.

Kebijakan kurikulum 2013 dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya (Rifa'i, 2017). Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang (Nasution, 2016). Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik pembelajaran sebagaimana amanat tujuan pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Perubahan kebijakan 2013 menyangkut empat elemen perubahan kurikulum yaitu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses, dan Standar Penilaian. Sedangkan perubahan kebijakan kurikulum 2013 berdampak pada empat hal yaitu model pembelajaran berupa tematik-integratif, pendekatan saintifik, strategi aktif, dan penilaian autentik. Perubahan kebijakan tersebut dalam rangka menyiapkan generasi masa depan Indonesia yang kreatif, inovatif, produktif, dan afektif yang mampu membawa bangsa Indonesia maju dan berperadaban di masa yang akan datang

Kurikulum 2013 diciptakan sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Dalam implementasi kurikulum 2013 ini tentunya guru dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari pendidik ini sangat diperlukan agar dapat melaksanakan kurikulum 2013 sesuai dengan amanat

kurikulum (Pawero, 2021). Bukankah untuk menciptakan generasi berpengetahuan tinggi, berketerampilan, dan berkarakter bagus diperlukan guru yang pengetahuan, keterampilan, dan karakternya dapat diandalkan. penyusunan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.

Sejatinya, penelitian relevan tentang pelaksanaan kurikulum pendidikan telah dikaji secara luas dari berbagai tema. Di antaranya membahas dari tema pengembangan kurikulum (Azis, 2018; Ikhsan & Hadi, 2018), hambatan pelaksanaan kurikulum (Firmansyah, 2007), kurikulum pendidikan dasar (Ningrum & Sobri, 2015; Yusuf, 2018; Rahelly, 2018; Suherman, 2014), kurikulum pendidikan karakter (Manab, 2018; Islam, 2017; Novitasari, *et.al.*, 2019; Maulida, *et.al.*, 2015), revitalisasi kurikulum (Fahmi & Bitasari, 2020), kompetensi profesional dan pedagogik pendidik (Turmuzi & Wahidaturrahmi, 2021), asesmen autentik (Marhaeni, 2015), budaya religius pada siswa (Ma'rufah, 2020), serta peran guru dalam implementasi kurikulum (Ardianingsih, *et.al.*, 2017).

Mencermati uraian di atas, dipahami kajian akademik tentang pelaksanaan kurikulum pembelajaran fikih di madrasah dibahas seputar tema pengembangan, re-orientasi, revitalisasi, hingga evaluasi pelaksanaan kurikulum. Penelitian ini berupaya mengkaji “sisi kosong” yang belum diteliti sebelumnya, yakni dari aspek kebijakan pelaksanaan kurikulum, meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penelitian dimaksud terangkum dalam judul penelitian, “*Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Kurikulum Pembelajaran Fikih di MIN 1 Humbang Hasundutan*”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan atau literatur kepustakaan yang berkaitan dengan manajemen kurikulum fikih di MIN 1 Humbang Hasundutan. Dengan penelitian ini, diharapkan terdapat data yang berupa kata atau makna untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya secara mendalam apa yang dilakukan oleh MIN 1 Humbang Hasundutan dalam melaksanakan manajemen kurikulum fikih. Adapun yang dijadikan sebagai informan atau narasumber adalah kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, dan guru mata pelajaran fikih. Untuk mengumpulkan data penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi (Assingkily, 2021). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan (verifikasi). Uji keabsahan data penelitian menggunakan teknik triangulasi dan ketekunan pengamatan.

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan Kurikulum Pembelajaran Fikih

Perencanaan ialah tahapan awal dalam siklus proses (fungsi) manajemen (Suryapermana, 2017). Proses atau tahapan berikutnya mengacu pada rencana yang disepakati bersama. Sebagai suatu proses sistemik, perencanaan juga tidak terlepas dari siklus proses sebelumnya, sehingga dalam tahap perencanaan diawali dengan mengacu pada hasil evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan sebelumnya (Bararah, 2017). Inilah yang menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan proses pembelajaran yang lebih berkualitas.

Perencanaan yang matang menghasilkan mutu yang baik bagi proses pendidikan (Fitri, *et.al.*, 2017). Di sinilah peran kepala madrasah dibutuhkan untuk mampu

mengakomodir berbagai aspirasi dan kebutuhan lembaga. Peran kepala madrasah dalam konteks ini menghasilkan “kebijakan internal madrasah” (Alfiansyah, *et.al.*, 2020). Praktiknya, kepala madrasah membangun kerjasama dengan seluruh pihak madrasah dalam merencanakan program atau kegiatan madrasah, meliputi wakil kepala madrasah, tenaga pendidik, bidang tata usaha, dan komite madrasah guna perbaikan proses pembelajaran, serta perencanaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal ini senada dengan wawancara yang disampaikan oleh Kepala MIN 1 Humbang Hasundutan di bawah ini:

“... benar Pak, kami selalu melibatkan “warga madrasah” dalam menetapkan segala keputusan, terutama dalam aspek kurikulum, mulai dari komite madrasah, wakil kepala madrasah (khususnya bidang kurikulum), guru, dan juga tenaga kependidikan. Tujuannya pun tentu untuk menghadirkan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap semua kegiatan di madrasah” (Hasil wawancara dengan Hj. Sri Margiyani, S.Pd., 4 April 2022).

Mendukung kutipan wawancara di atas, Wakil Kepala Madrasah di MIN 1 Humbang Hasundutan, menuturkan:

“... setahu saya Pak, kegiatan rapat dengan melibatkan seluruh pihak madrasah dalam merencanakan program madrasah, agar proses penyusunan kurikulum berjalan dengan efektif. Selain itu, rapat juga diagendakan untuk membentuk tim penyusun kurikulum madrasah, sehingga setiap semester atau tahun terjadi peningkatan signifikan terhadap kualitas madrasah”.

Kutipan wawancara di atas, menginformasikan bahwa kegiatan rapat sebagai upaya perencanaan bersama dalam menyusun kurikulum madrasah, diperkuat dengan penetapan tim penyusun kurikulum di madrasah. Berkaitan dengan ini, Widiyanto & Wahyuni (2020) menjelaskan bahwa perencanaan kurikulum di madrasah dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada silabus pembelajaran. Lebih lanjut, berdasarkan observasi peneliti di madrasah, diperoleh informasi bahwa lampiran dokumentasi RPP pihak madrasah menunjukkan perencanaan yang efektif disusun pihak madrasah. Berdasarkan temuan peneliti, diperoleh informasi efektivitas perencanaan kurikulum madrasah di MIN 1 Humbang Hasundutan. Hal ini ditandai dengan upaya pihak madrasah dalam melakukan analisis kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, analisis ketersediaan dan kesiapan sumber daya di madrasah, analisis program pendukung yang dilaksanakan dalam agenda rapat kerja tahunan.

Mendukung temuan di atas, Nasution (2017) menerangkan bahwa perencanaan kurikulum pada satuan lembaga pendidikan harus diimbangi dengan kebijakan internal lembaga. Sebab, kebijakan nasional menjadi prinsip atau batas dasar menyusun program pembelajaran dan komponen pendukungnya, dan kebijakan internal berfungsi sebagai penyesuaian kebijakan nasional dengan kearifan lokal setempat. Bahkan, Sufiati & Afifah (2019) menambahkan bahwa pemberian ruang kepada pendidik dalam mengajar berbasis kearifan lokal, menjadi kesempatan kreasi dan inovasi dalam mengajar. Dengan demikian, dipahami bahwa perencanaan kurikulum pembelajaran fikih di MIN 1 Humbang Hasundutan telah terlaksana dengan baik dengan mengintegrasikan kebijakan kurikulum nasional dan kebijakan internal madrasah berbasis kearifan lokal.

Pelaksanaan Kurikulum Pembelajaran Fikih

Pelaksanaan kurikulum pembelajaran merupakan bentuk kontekstualisasi dari konsep yang disepakati (perencanaan kurikulum sebelumnya). Kurikulum yang dilaksanakan berbentuk praktik pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas (Suwandayani, 2018). Dalam konteks ini, kepala madrasah berperan penting melakukan supervisi kegiatan pelaksanaan kurikulum di madrasah (Talibo, 2018). Sebagaimana disampaikan oleh Kepala MIN 1 Humbang Hasundutan berikut ini:

“... pelaksanaan kurikulum di madrasah, berjalan efektif selama ini Pak. Sebab, kegiatan pengawasan atau supervisi dan juga tanggung jawab kegiatan di bawah naungan kepala madrasah yang dibantu oleh wakil kepala madrasah (WKM) bidang kurikulum”.

Senada dengan kutipan wawancara di atas, Guru MIN 1 Humbang Hasundutan menuturkan bahwa:

“...Kepala madrasah mengarahkan tenaga pendidik untuk menyusun prota, promes, dan RPP untuk diimplementasikan di kelas mereka masing-masing, tapi walau bagaimanapun mereka tetap ikut ke dalam pedoman yang berdasarkan kurikulum yang ada namun di sisi lain juga tidak terlepas dari bimbingan Kepala madrasah. Di mana Kepala madrasah sebagai supervisor di madrasah, jadi Kepala madrasah juga ikut membimbing demi kelancaran proses belajar mengajar di madrasah”.

Berkaitan dengan kutipan wawancara di atas, Anggraeni & Akbar (2018) menjelaskan bahwa pelaksanaan kurikulum pembelajaran merupakan tugas atau wewenang guru dalam mengkreasiannya. Begitupun, Dewi & Sadjiarto (2021) menambahkan bahwa kepala madrasah berperan mengarahkan, membina, memberi bimbingan, dan melaksanakan supervisi atas kurikulum pembelajaran. Bahkan, Pohan & Dafit (2021) mengistilahkan bahwa kepemimpinan pembelajaran merupakan wewenang guru sebagai individu yang melakukan interaksi pembelajaran dengan siswa.

Berdasarkan temuan di madrasah, dipahami bahwa kurikulum yang diimplementasikan dalam pembelajaran fikih di madrasah meliputi aspek acuan berupa silabus dan RPP, strategi pembelajaran tematik, metode hafalan, demonstrasi, ceramah, tutor sebaya, dan portofolio. Kemudian, pihak guru dalam proses pembelajaran menggunakan media papan tulis dan proyektor. Dengan demikian, dipahami bahwa pelaksanaan kurikulum pembelajaran fikih di MIN 1 Humbang Hasundutan telah terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan optimalisasi peran supervisor dan monitoring kepala madrasah, pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi dan kualitas para guru, serta koordinasi dengan para guru di madrasah dalam agenda rapat mingguan.

Evaluasi Kurikulum Pembelajaran Fikih

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program madrasah yang telah direncanakan (Setemen, 2010). Untuk itu, evaluasi harus dilaksanakan secara objektif sebagai acuan untuk membuat perencanaan berikutnya (Nuriyah, 2016). Selain itu, tahap evaluasi juga menjadi indikator kemampuan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, serta kemampuan guru dalam mengajar peserta didik (Hidayat & Asyafah, 2019). Ini

menunjukkan bahwa proses evaluasi bernilai urgen dalam pelaksanaan fungsi manajemen pendidikan.

Lazimnya, evaluasi kurikulum pembelajaran di madrasah dilaksanakan dalam agenda rapat tahunan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala MIN 1 Humbang Hasundutan berikut ini:

“... Selain rapat evaluasi kurikulum madrasah, tenaga pendidik memiliki tugas untuk melakukan pengawasan/evaluasi terhadap peserta didik dengan mengidentifikasi cara belajar, prestasi belajar, inovasi belajar, keaktifan serta hasil belajar siswa. Tenaga pendidik melakukan evaluasi kurikulum mulai dari tahap konteks, yaitu dengan mengidentifikasikan masalah yang muncul pada saat pelaksanaan pembelajaran”.

Senada dengan kutipan wawancara di atas, Guru MIN 1 Humbang Hasundutan menuturkan:

“Evaluasi atau penilaian pada pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah menggunakan sistem penilaian dengan ulangan dengan ketentuan ulangan dilaksanakan untuk melihat ketuntasan setiap kompetensi dasar, kemudian hasil ulangan dapat dianalisis dan ditindaklanjuti melalui program remedial, dan program pengayaan”.

Kutipan wawancara di atas, menginformasikan perihal evaluasi yang dilaksanakan di madrasah. Mengacu pada peraturan yang berlaku, pelaksanaan penilaian mata pelajaran khususnya pendidikan agama Islam di madrasah, dilakukan dengan menggunakan buku daftar nilai mata pelajaran yang berisi daftar hadir peserta didik, daftar nilai latihan soal, pekerjaan rumah (PR), dan ulangan (Hani, 2019). Selanjutnya, adapun faktor pendukung dalam manajemen kurikulum itu sendiri terdapat pada manajemen sekolah yang harus terlaksana dengan baik, seperti pada perencanaan guna menentukan tujuan kurikulum, pengorganisasian dengan pembentukan tim kurikulum, pelaksanaannya, serta pengawasannya, jika manajemen sekolahnya baik, maka tujuan kurikulum dapat terlaksana dengan baik (Riadi, 2018).

Dengan demikian, dipahami bahwa tahap evaluasi menjadi hal penting dalam implementasi kebijakan kurikulum di MIN 1 Humbang Hasundutan, meliputi penilaian setiap tahun sekali, berupa evaluasi program dalam kurikulum, perencanaan perangkat pembelajaran, dan evaluasi peserta didik. Selain itu, kualitas kinerja guru harus diperhatikan, guru harus mampu menguasai materi pelajaran, mampu mengelola program pembelajaran, mampu menggunakan media dan sumber belajar, serta mampu menilai prestasi belajar siswa.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kurikulum pembelajaran fikih di MIN 1 Humbang Hasundutan terlaksana dengan baik. Hal ini ditandai dengan (1) aspek perencanaan; meliputi analisis kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, analisis ketersediaan dan kesiapan sumber daya di madrasah, analisis program pendukung yang dilaksanakan dalam agenda rapat kerja tahunan (2) aspek pelaksanaan; meliputi optimalisasi peran supervisor dan monitoring kepala madrasah, pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi dan kualitas para guru, serta koordinasi dengan para guru di madrasah dalam agenda rapat mingguan, (3) aspek evaluasi; meliputi penilaian setiap tahun

sekali, berupa evaluasi program dalam kurikulum, perencanaan perangkat pembelajaran, dan evaluasi peserta didik.

Daftar Pustaka

- Alfiansyah, M., Assingkily, M.S., & Prastowo, A. (2020). Kebijakan Internal Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman*, 11(1), 52-67. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/MAGISTRA/article/view/3460>.
- Amri, U., Rifma, R., & Syahril, S. (2021). Konsistensi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2200-2205. <https://www.edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/778>.
- Anggraeni, P., & Akbar, A. (2018). Kesesuaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Proses Pembelajaran. *Jurnal Pesona Dasar*, 6(2). <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/PEAR/article/view/12197>.
- Anwar, M.E. (2017). "Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia" *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(05). <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/43>.
- Ardianingsih, F., Mahmudah, S., & Rianto, E. (2017). Peran Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus pada SLB di Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan: Teori dan Praktik*, 2(1), 21-30. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jp/article/view/917>.
- Assingkily, M.S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Azis, R. (2018). Implementasi Pengembangan Kurikulum. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 7(1), 44-50. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/4932>.
- Aziz, A.A., Nurfarida, R., Budiyaniti, N., & Zakiah, Q.Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192-201. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/article/view/2575>.
- Bararah, I. (2017). Efektivitas Perencanaan Pembelajaran dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 131-147. <https://www.jurnal-ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/1913>.
- Dewi, T.A.P., & Sadjiarto, A. (2021). Pelaksanaan Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 1909-1917. <http://www.jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/1094>.
- Disas, E.P. (2017). Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(2). <https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/8251>.
- Disas, E.P. (2018). Link and Match Sebagai Kebijakan Pendidikan Kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 18(2), 231-242. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/12965>.
- El Widad, Z., & Bakar, A.M.Y. (2021). Wajah Baru Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi dan Analisis Problematika Kebijakan Pendidikan di Tengah Pandemi. *MAPPESONA: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 1-12. <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/2058/>.

- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(1), 67-71. <http://www.jurnal.iicet.org/index.php/jrti/article/view/817>.
- Fahmi, F., & Bitasari, W. (2020). Revitalisasi Implementasi Kurikulum Pendidikan. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 14(2), 81-91. <http://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/article/view/30>.
- Firmansyah, F. (2007). Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Struktur dan Kendalanya). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1). <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/207>.
- Fitri, A., Saparahayuningsih, S., & Agustriana, N. (2017). Perencanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 2(1), 1-13. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/potensia/article/view/3032>.
- Hani, A.A. (2019). Evaluasi Pembelajaran pada PAUD. *Jurnal CARE*, 7(1), 51-56. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JPAUD/article/view/4698>.
- Hastuti, T.P., & Soehartono, S. (2018). Kebijakan Pendidikan Ditinjau dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Jurispudence*, 8(1), 34-41. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/6293>.
- Hidayat, T., & Asyafah, A. (2019). Konsep Dasar Evaluasi dan Implikasinya dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 159-181. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/3729>.
- Ikhsan, K.N., & Hadi, S. (2018). Implementasi dan Pengembangan Kurikulum 2013. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 6(1), 193-202. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/edukasi/article/view/1682>.
- Islam, S. (2017). "Karakteristik Pendidikan Karakter, Menjawab Tantangan Multidimensional Melalui Implementasi Kurikulum 2013" *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 89-10. <http://ejournal.unuja.ac.id/index.php/edureligia/article/view/50>.
- Lengkana, A.S., & Sofa, N.S.N. (2017). Kebijakan Pendidikan Jasmani dalam Pendidikan. *Jurnal Olahraga*, 3(1), 1-12. <http://jurnalolahraga.stkippasundan.ac.id/index.php/jurnalolahraga/article/view/67>.
- Ma'rufah, A. (2020). Implementasi Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Upaya Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah). *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 125-136. <http://www.jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/6>.
- Manab, H.A. (2018). Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter Pendekatan Konfluensi. *Repository UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*. <http://repo.uinsatu.ac.id/10154/1/Implementasi%20Kurikulum%20Pendidikan%20Karakter%20Pendekatan%20Konfluensi.pdf>.
- Marhaeni, A.A.I.N. (2015). Asesmen Autentik dan Pendidikan Bermakna: Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPI/article/view/4889>.
- Maulida, M., Wati, M., & An'nur, S. (2015). Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Pendidikan Karakter dalam Mendukung Implementasi Kurikulum 2013. *Berkala Ilmiah Pendidikan Fisika*, 3(1), 11-19. <http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/bipf/article/download/760/pdf>.
- Nasution, E. (2016). Problematika Pendidikan di Indonesia. *Mediasi*, 8(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/229361428.pdf>.

- Nasution, W.N. (2017). Perencanaan Pembelajaran: Pengertian, Tujuan, dan Prosedur. *Ittihad: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 185-195. <http://repository.uinsu.ac.id/5341/1/PERENCANAAN%20PEMBELAJARAN%20PENGERTIAN%2C%20TUJUAN%20DAN%20PROSEDUR.pdf>.
- Ningrum, E.S., & Sobri, A.Y. (2015). Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 24(5), 416-423. <http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/volume-24-no.-564-71.pdf>.
- Novitasari, R.D., Wijayanti, A., & Artharina, F.P. (2019). Analisis Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter Sebagai Implementasi Kurikulum 2013. *Indonesian Values and Character Education Journal*, 2(2), 79-86. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IVCEJ/article/view/19495>.
- Nuriyah, N. (2016). Evaluasi Pembelajaran: Sebuah Kajian Teori. *Eduksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 3(1). <https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/edueksos/article/view/327>.
- Pawero, A.M.D. (2021). Arah Baru Perencanaan Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 16-32. <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah/article/view/177>.
- Pohan, S.A., & Dafit, F. (2021). Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1191-1197. <http://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/898>.
- Pratama, Y.A. (2019). Integrasi Pendidikan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kebijakan Pendidikan Madrasah di Indonesia). *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 95-112. <http://103.88.229.8/index.php/tadzkiyyah/article/view/3838>.
- Rahelly, Y. (2018). Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumatera Selatan. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 12(2), 381-390. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpud/article/view/9319>.
- Riadi, A. (2018). Kompetensi Guru dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran. *ITTIHAD*, 15(28), 52-67. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/1933>.
- Rifa'i, M. (2017). Kebijakan Pendidikan Islam dalam Era Otonomi Daerah. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 99-114. <http://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/31>.
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Alim: Journal of Islamic Education*, 3(2), 197-208. <https://jurnal.kopertais1.or.id/alim/article/view/218>.
- Saifuddin, A. (2015). Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 207-234. <http://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/45>.
- Setemen, K. (2010). Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Online. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 43(3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPP/article/viewFile/124/118>.
- Sufiati, V., & Afifah, S.N. (2019). Peran Perencanaan Pembelajaran untuk Performance Mengajar Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 8(1), 48-53. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/26609>.
- Suherman, A. (2014). Implementasi Kurikulum Baru Tahun 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani (Studi Deskriptif Kualitatif pada SDN Cilengkrang). *Mimbar Sekolah Dasar*, 1(1), 71-76. <https://ejournal.upi.edu/index.php/mimbar/article/view/866>.

- Supardi, U.S. (2015). Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2). <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Formatif/article/view/92>.
- Suryapermana, N. (2017). Manajemen Perencanaan Pembelajaran. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 183-193. <http://103.20.188.221/index.php/tarbawi/article/view/1788>.
- Suwandayani, B.I. (2018). Analisis Perencanaan Pembelajaran Tematik pada Kurikulum 2013 di SD Negeri Kauman I Malang. *ELSE: Elementary School Education Journal*, 2(1), 78-88. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/pgsd/article/view/1214>.
- Talibo, I. (2018). Fungsi Manajemen dalam Perencanaan Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 7(1). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII/article/view/606>.
- Turmuzi, M., & Wahidaturrahmi, W. (2021). Analisis Kompetensi Profesional dan Pedagogik Mahasiswa Pendidikan Matematika dan Implementasi Kurikulum 2013. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 341-354. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/301>.
- Widiyanto, I.P., & Wahyuni, E.T. (2020). Implementasi Perencanaan Pembelajaran. *Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen*, 4(2), 16-35. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/Satya-Sastraharing/article/view/607>.
- Winata, K.A., Zaqiah, Q.Y., Supiana, S., & Helmawati, H. (2021). Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi. *Ad-Man-Pend: Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, 4(1), 1-6. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/jaeducation/article/view/3338>.
- Yusuf, W.F. (2018). Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Al-Murabbi*, 3(2), 263-278. <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/view/1097>.